

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
1.2.1 Permasalahan.....	9
1.2.2 Ruang Lingkup.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Eksistensi Komisi Negara Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	12
2.1.1 Teori Kewenangan Konstitusional Komisi-Komisi Negara.	14
2.1.2 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan.....	15
2.1.3 Asas Peraturan Perundang-undangan.....	16
2.1.4 Kerangka Peraturan Perundang-undangan.....	17
2.2 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Pasca- Amandemen	18
2.2.1 Struktur Komisi Informasi di Struktur Ketatanegaraan	19
2.3 Pengertian Dan Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ..	21
2.3.1 Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	21
2.3.2 Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	23
2.4 Pengerttian-Pengertian	24
2.4.1 Pengertian Eksistensi	24
2.4.2 Pengertian Asas Keterbukaan	25

2.4.3	Pengertian Asas Efektifitas	26
2.4.4	Pengertian Informasi	27
2.4.5	Pengertian Informasi Publik.....	27
2.4.6	Pengertian Badan Publik	31
2.4.7	Pengertian Komisi Informasi	32
2.4.8	Pengertian Sengketa Informasi Publik	32
2.4.9	Pengertian Mediasi.....	32
2.4.10	Pengertian Ajudikasi.....	32
2.4.11	Pengertian Pejabat Publik.....	32
2.4.12	Pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi....	32
2.4.13	Pengertian Pemohon Informasi Publik.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan Masalah.....	34
3.2	Sumber dan Jenis Data	35
3.2.1	Data Primer	35
3.2.2	Data Sekunder	36
3.3	Tehnik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	36
3.3.1	Tehnik Pengumpulan Data.....	36
3.3.2	Metode Pengolahan Data	37
3.4	Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Karakteristik Responden	39
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.2	Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Informasi	42
4.1.3	Keterbukaan Informasi Dalam Perspektif UU KIP.....	47
4.2	Eksistensi Komisi Informasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	48
4.2.1	Lembaga/Badan Penyelenggara Pemerintah Untuk Pelayanan Publik	50
4.2.2	Korelasi Keterbukaan Komisi Informasi dengan Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme)..	56

4.2.3 Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	59
4.3 Tugas dan Tanggungjawab Komisioner Provinsi Lampung Untuk Menangani Sektor- Sektor Informasi.....	59
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN